



Pemerintah
Kabupaten
Temanggung



Rencana Kerja Tahun 2027

Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPERIDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

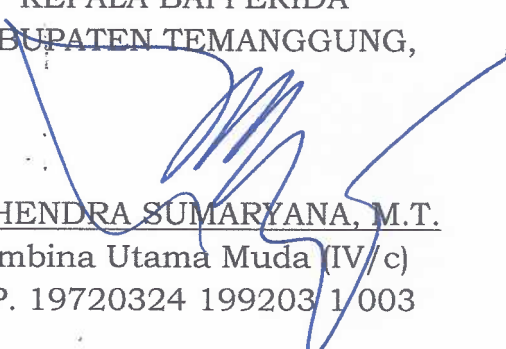
Petugas Verifikator,



ARIA ISPRADANA, S.Kom
NIP. 19891212 202202 1 002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Renja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah. Renja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disertai dengan penetapan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2027.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Bapperida ini masih banyak dijumpai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Bapperida ini, terutama apabila dilakukan *review* atas Renja Bapperida Kabupaten Temanggung ini di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
BAPPERIDA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo Bapperida Tahun 2026 dan Capaian Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida	22
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida.....	 41
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	 56
2.7. Inovasi Prangkat Daerah	57
2.8. Penghargaan	62
 BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	63
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bapperida	66
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	84
4.1. Program dan Kegiatan	84
 BAB V	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	91
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	91
 BAB VI	
PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung.....	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung.....	24
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung.....	20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung.....	25
Tabel 2.6	Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025.....	43
Tabel 2.7	<i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027.....	45
Tabel 2.8	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung.....	56
Tabel 2.9	Daftar Inovasi Perangkat Daerah.....	57
Tabel 3.0	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	62
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2027.....	64
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Bapperida Kab. Temanggung Tahun 2027.....	67
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Bapperida Kab. Temanggung Tahun 2027.....	85
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2027.....	91
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

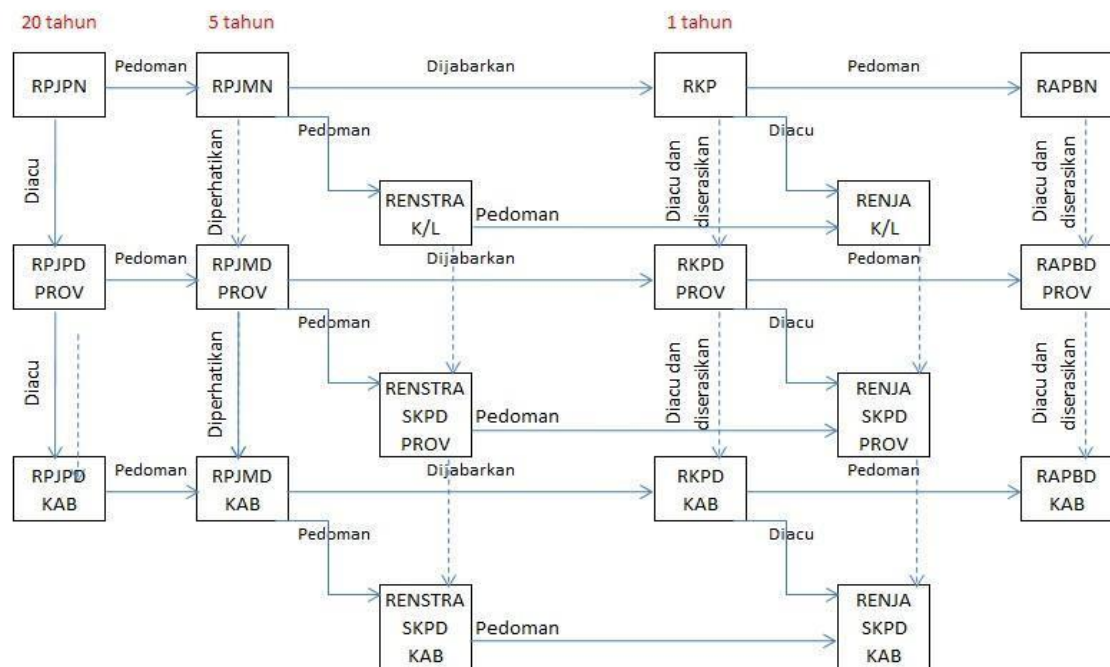
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan BAPPERIDA Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja BAPPERIDA Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BAPPERIDA Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1.
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BAPPERIDA, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BAPPERIDA, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BAPPERIDA;
- 2) Kondisi pelayanan BAPPERIDA;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPERIDA;
- 4) Data Pokok Pembangunan BAPPERIDA;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan BAPPERIDA;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BAPPERIDA.

b. Analisis gambaran pelayanan BAPPERIDA;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BAPPERIDA adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BAPPERIDA.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BAPPERIDA untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BAPPERIDA.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPERIDA tahun lalu berdasarkan Renstra BAPPERIDA;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BAPPERIDA. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BAPPERIDA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BAPPERIDA tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra BAPPERIDA;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra BAPPERIDA;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra BAPPERIDA sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPERIDA tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BAPPERIDA.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BAPPERIDA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPPERIDA;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPERIDA;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPERIDA;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BAPPERIDA. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan

yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPERIDA.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi [PERANGKAT DAERAH] dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BAPPERIDA;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BAPPERIDA merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BAPPERIDA;

Penyempurnaan rancangan Renja BAPPERIDA perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BAPPERIDA dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BAPPERIDA dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BAPPERIDA yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BAPPERIDA Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BAPPERIDA Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BAPPERIDA untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BAPPERIDA Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BAPPERIDA Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BAPPERIDA Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BAPPERIDA Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BAPPERIDA Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2025 dan Capaian Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja BAPPERIDA Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2025 terhadap capaian Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BAPPERIDA sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BAPPERIDA 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026
 Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
								K	Rp (DPA)		K
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.538.985.011		1.538.964.161	
501	PERENCANAAN							6.408.985.011		1.533.529.561	
50101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersedian administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	100	100	100	5.783.985.011		1.504.870.561	
		Jumlah orag yang menerima Gaji dan tunjangan	%	100	100	100	100				
50101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						4.774.178.492		1.328.448.796	
5010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44	44	100	45	4.774.178.492	11	1.328.448.796	24
50101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Terfasilitasi						109.525.600		4.701.801	
5010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	1	6.365.000	0,25	30.000	25

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
								K	Rp (DPA)	K	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
5010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	1	14.685.000	0,25	365.000	25
5010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	2	19.156.000	0,75	-	38
5010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	15	69.319.600	3,75	4.306.801	25
50101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun						672.367.969		123.697.524	
5010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	1	1.425.000	0,25	150.000	25
5010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	100	12	109.100.000	3	22.713.284	25
5010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	6	28.924.380	1,5	-	25
5010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	532.918.589	3	100.834.240	25

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp (DPA)	K	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
50101209	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Yang Dipelihara						227.912.950		48.022.440	
5010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	100	27	161.166.750	6,75	12.800.960	25
5010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	2	66.746.200	0,5	35.221.480	25
50102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							625.000.000		18.575.000	
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	70	70	100	75				
		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah	%	88	88	100	90				
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	50	50	100	55				
50102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun						152.500.000		17.800.500	
5010220106	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencnaaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100	2	20.000.000	1	545.500	50

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp (DPA)	K	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
5010220107	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	5	100	4	132.500.000	1	17.255.000	25
50102202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah yang Disusun						467.500.000		774.500	
5010220202	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembnagunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	46	46	100	3	450.000.000	-	-	-
5010220203	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	3	3	100	3	17.500.000	0,75	774.500	25
50102203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah yang Disusun						5.000.000		-	
5010220203	Monitoring Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	5	100	3	5.000.000	0,75	-	25
50103	PROGRAM KOORDINASI DANKRONISASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH							200.302.000		10.084.000	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur	%	85	85	100	88				

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	Rp (DPA)	10	11	12=10/8
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang ekonomi dan SDA	%	85	85	100	88				
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	85	85	100	88				
50103201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang Diverifikasi						82.500.000		5.221.000	
5010320101	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100	66	35.000.000	16,5	85.000	25
5010320103	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	3	100	5	5.000.000	1,25	155.000	25
5010320105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	11	37.500.000	2,75	4.936.000	25

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								K	Rp (DPA)		K
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
5010320107	Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah BidangPembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	6	6	100	7	5.000.000	1,75	45.000	25
50103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Diverifikasi						62.802.000		3.808.000	
5010320201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	100	6	42.802.000	1	3.533.000	25
5010320203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	6	100	1	5.000.000	1,5	275.000	25
5010320205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100		15.000.000	0,25	-	25
50103203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Diverifikasi						55.000.000		1.055.000	

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
								K	Rp (DPA)		K
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
5010320301	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	6		2	50.000.000	0,25	855.000	25
5010320303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	3		3	5.000.000	0,7	200.000	25
505	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							130.000.000		5.434.600	
50502	Program penelitian dan pengembangan Daerah							27.000.000		3.177.000	
		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang ditunagka dalam dokumen perencanaan	%	50	50	100	60				
50502201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembnagan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun						25.000.000		2.077.000	
5050220112	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3	3		3	25.000.000	0,75	2.077.000	25

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
								K	Rp (DPA)	K	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
50502202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Disusun						2.000.000		1.100.000	
5050220210	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	2	2		1	2.000.000	0,25	1.100.000	25
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	50	50	100	70	103.000.000		2.257.600	
		Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50	50	100	60				
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Disusun						40.000.000		817.500	
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasiitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan	Dokumen	-	-	-	2	40.000.000	0,5	817.500	25
	Invensi dan Inovasi							63.000.000		1.440.100	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi	Dokumen	-	-	-	1	3.945.500	0,25	-	25

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
								K	Rp (DPA)		K
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasu dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	laporan	-	-	-	1	2.000.000	0,25	-	25
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerpaan ilmu pengetahuan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya didaerah	kegiatan	-	-	-	2	2.713.500	0,5	1.440.100	25
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	laporan	-	-	-	2	54.341.000	0,5	-	25

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BAPPERIDA di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko;
 - b. Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah;
 - c. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA;
 - e. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur;
 - f. Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan;
 - g. Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis;
 - h. Persentase inovasi yang dimanfaatkan.
2. Faktor Penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemahaman penting keselarasan pada Program RKPD dengan program RPJMD;
 - b. Adanya kewajiban Perangkat daerah untuk menyusun dokumen Resiko pada proses perencanaan;
 - c. Kesadaran Perangkat daerah dalam memperhatikan capaian kinerjanya;
 - d. Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang ekonomi dan SDA;
 - f. Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang Infrastruktur;
 - g. Adanya data dan hasil kajian yang relevan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- h. Adanya kerja sama dan sinergi dengan BRIN dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan riset, Adanya road map dan agenda riset yang sejalan dengan prioritas dan isu strategis daerah;
 - i. Adanya peningkatan partisipasi dalam KRENOVA dari unsur masyarakat dan pelajar/mahasiswa, Adanya penghargaan/apresiasi terhadap prestasi inovasi.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. memperkuat sinkronisasi antara RKPD, RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah agar program dan kegiatan tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, penerapan manajemen risiko dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan melalui pendampingan, monitoring, dan pengalokasian anggaran yang mendukung mitigasi risiko;
 - b. Koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah, khususnya pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta infrastruktur perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui forum koordinasi dan evaluasi secara berkala. Penguatan perencanaan berbasis kinerja juga perlu didukung dengan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan agar capaian kinerja tetap optimal;
 - c. kualitas perencanaan perlu didukung dengan penyediaan data dan hasil kajian yang akurat serta penguatan kerja sama dengan BRIN, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan riset sesuai prioritas pembangunan daerah. Di sisi lain, dukungan anggaran terhadap pengembangan inovasi melalui KRENOVA perlu terus ditingkatkan, termasuk pembinaan, pemberian apresiasi, dan fasilitasi penerapan hasil inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa BAPPERIDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat **Baik** yaitu dengan nilai **100%,**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP sebesar 97.17%
2. Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah sebesar 100%
3. Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 96.87%
4. Kapabilitas Inovasi sebesar 100%
5. Nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 97,17%
6. Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BAPPERIDA dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR KINERJA TUJUAN									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	81,00	82.2	83.4	94,78	94,78	100	ST
2	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	73,00	73.5	74	88,88	88,88	100	ST
INDIKATOR KINERJA SASARAN									
1	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,20	21,30	21.4	21.75	21.75	100	ST
2	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	85	87	89	98,56	98,56	100	ST
3	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,005	3,01	3.015	2,911	2,911	96,71	ST
4	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,60	2,65	2.7	2.66	2.66	100	ST
5	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	88,26	88.28	88.3	85.76	85.76	97,15	ST
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	83,65	83,75	83.85	83.65	83.65	100	ST
INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	88	90	92	100	98,80	100	ST
2	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	50	55	60	100	100	100	ST
3	Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	70	75	80	97,83	89,13	100	ST
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	85	88	91	98,37	100	100	ST
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	85	88	91	96,23	100	100	ST
6	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	85	88	91	97,37	100	100	ST
7	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	50	60	70	100	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
8	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50	50	50	100	100	100	ST
9	Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	50	60	70	100	100	100	ST

Sumber: *BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026*

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR SPM									
1	NIHIL								
2									

Sumber: *BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026*

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR SPM									
1	NIHIL								
2									

Sumber: *BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026*

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR IKK									
1	NIHIL								
2									

Sumber: *BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026*

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 94,78. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 100% dan melampaui target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 4,5, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 85,80, realisasi Tahun 2025 sebesar 94,78 telah melampaui target 2029, yang berarti target jangka menengah telah tercapai bahkan sebelum periode berakhir, capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan inovasi dan riset yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Pencapaian ini menjadi dasar strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPPD pada periode berikutnya. Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah :

- a. faktor pendorong : Integrasi antara dokumen pembangunan dan dokumen kinerja perangkat daerah sudah menunjukkan keterhubungan dan sinergi yang baik sehingga menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan berada pada kategori sangat baik
- b. faktor Penghambat : Dokumen perencanaan tahunan daerah belum menunjukkan dukungan program daerah terhadap prioritas nasional, Penyajian inovasi daerah yang belum menunjukkan penyelesaian terhadap permasalahan pembangunan serta masih terdapat bidang/urusan yang belum memiliki inovasi
- c. rekomendasi tindaklanjut : Penyajian data dan informasi terkait program daerah yang mendukung prioritas nasional sesuai kewenangan daerah, Pengembangan inovasi daerah diarahkan agar dapat menjawab permasalahan/isu pembangunan per bidang/urusan.

2. Indeks Inovasi Daerah

Indikator Indeks Inovasi Daerah, perkembangan capaian menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 capaian indeks inovasi daerah sebesar 45,58, kemudian meningkat cukup signifikan pada Tahun 2022 menjadi 70,92, dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 80,87. Pada Tahun 2024 sempat mengalami penurunan menjadi 72,42, hal dipengaruhi oleh perubahan indikator penilaian. Namun pada Tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 88,88, yang menunjukkan adanya peningkatan komitmen perangkat daerah dalam pengembangan inovasi serta pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public. Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah :

- a. Faktor Keberhasilan : Nilai kematangan inovasi yang dikirim untuk dilaporkan ke BSKDN cukup baik
- b. Faktor Kegagalan : Data dukung inovasi yang dilaporkan tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan sehingga mempengaruhi nilai kematangan inovasi
- c. rekomendasi tindaklanjut : Pembentukan tim verifikasi (quality control) data dukung inovasi untuk mengoptimalkan nilai kematangan inovasi yang dilaporkan, Memberikan fasilitasi pendampingan kepada inventor dalam melakukan pelaporan inovasi.

3. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi tersebut terdiri dari 4 komponen yang dinilai, salahsatunya Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,20 ditahun 2024, sedangkan untuk nilai perencanaan kinerja SAKIP

tahun 2025 belum rilis, karena proses pengumpulan dan verifikasi data seperti dokumen Rencana Kerja, Laporan Kinerja. Instansi Pemerintah dan dokumen pendukung lainnya serta proses upload pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kementrian PANRB. Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah :

- a. Faktor Keberhasilan : Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti rekomendasi sebagian hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya Perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tingkat Pemda dan sebagian Perangkat Daerah (PD)
 - b. Faktor Kegagalan : Penjenjangan kinerja pada level Pemda maupun sebagian besar PD yang dilakukan belum dapat mengurai isu-isu strategis pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan penyusunan Critical Success Factor (CSF) belum menjabarkan pada faktor pendorong yang relevan. Selain itu, dokumen perencanaan seperti Perjanjian Kinerja belum disusun berdasarkan Pohon Kinerja/Cascading yang telah dibuat
 - c. rekomendasi tindaklanjut: Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi hasil atau mengarah pada perbaikan berdasarkan isu-isu strategis daerah serta sesuai dengan level kinerjanya.
4. Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu 98,56, nilai ini berada pada kategori Sangat Tinggi dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 85 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah telah berjalan relative efektif dan terarah, terutama dari sisi tatakelola perencanaan. Konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga Renja perangkat daerah, telah terjaga dengan baik dan didukung oleh ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan maupun evaluasi. Kondisi ini mencerminkan kapasitas perencanaan administratif yang sudah matang dan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nilai IKPD

Kabupaten Temanggung. Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah :

- a. Faktor Keberhasilan : Adanya komitmen pimpinan Perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi target kinerja dan adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (review) yang teratur terhadap realisasi program, guna mengidentifikasi hambatan secara dini
- b. Faktor Kegagalan : Masih ada program kerja yang berfokus pada penyerapan anggaran semata, bukan pada hasil akhir (output/outcome)
- c. Alternatif Solusi : Penyusunan indikator program harus didasarkan pada analisis data riil kondisi daerah, bukan sekadar kelanjutan kegiatan tahun lalu

5. Manajemen Risiko Indeks

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 No. PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025, Skor Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung sebesar 2,911, skor ini dibawah target tahun 2025 yaitu 3,005. Penurunan skor terletak pada fokus, kedalaman, dan orientasi penilaiannya. Pada tahun 2024, penilaian manajemen risiko masih lebih menekankan pada kepatuhan (compliance based), yaitu keberadaan kebijakan, pedoman, struktur pengelola risiko, serta kelengkapan dokumen seperti profil risiko, peta risiko, dan rencana pengendalian. Selama perangkat daerah sudah memiliki dokumen dan melaksanakan tahapan manajemen risiko secara formal, nilai indeks relatif dapat dipenuhi meskipun implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan Keputusan. Sementara itu, pada tahun 2025, penilaian bergeser ke arah implementasi dan efektivitas (performance based). Fokus utama tidak lagi hanya “ada atau tidaknya” dokumen, tetapi sejauh mana manajemen risiko benar-benar diterapkan, dimanfaatkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, serta mampu menurunkan tingkat risiko utama. Penilaian juga lebih menekankan keterkaitan manajemen risiko dengan pencapaian kinerja, pengendalian intern, dan akuntabilitas

pembangunan daerah. Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah :

- a. Faktor Keberhasilan : Adanya dasar perencanaan strategis yang cukup baik, termasuk 20 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan capaian nilai evaluasi SAKIP yang mendapat skor B. Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil, seperti pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang sesuai dengan Peraturan BPKP, menjadi landasan penting untuk penguatan MRI. Rekomendasi terkait, seperti reviu perencanaan kinerja dengan cascading dan logical framework, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi MR, memberikan peluang besar untuk memperbaiki implementasi manajemen risiko. Komitmen terhadap penguatan pengelolaan risiko pada sektor strategis dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif juga menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan maturitas pengelolaan risiko di Kabupaten Temanggung
- b. Faktor Kegagalan : Berdasarkan catatan LHE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemkab Temanggung:
 - Belum adanya indikator MRI yang ditetapkan secara resmi di setiap Perangkat Daerah, mengakibatkan keterbatasan dalam pengukuran kinerja manajemen risiko.
 - Kurangnya pegawai yang bersertifikasi MR dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko menjadi kendala dalam penguatan kapasitas dan implementasi yang efektif.
 - Kualitas identifikasi dan analisis risiko belum mencapai level yang memadai, terutama pada risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud)
 - Cakupan monitoring dan evaluasi risiko masih terbatas, sehingga efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dalam mengurangi dampak risiko belum teruji sepenuhnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan struktural, peningkatan kapasitas sumber daya
- c. Rekomendasi tindaklanjut:

- Reviu dan perbaikan perencanaan kinerja dengan memperhatikan cascading, proses bisnis, serta logical framework agar sasaran, indikator, dan target kinerja lebih terukur dan SMART
- Penguatan implementasi pengelolaan risiko terutama pada sektor strategis daerah, serta memastikan proses Monitoring dan Evaluasi MR dapat menguji efektivitas pengurangan dampak dan penyebab risiko secara lebih sistematis dan berkelanjutan
- Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 – 2029

6. Kapabilitas Inovasi

Indikator *Kapabilitas* Inovasi pada tahun 2025 menunjukkan realisasi 2,62 dari target 2,6, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya penguatan riset dan inovasi di daerah telah terlaksana secara optimal pada tahun tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029, yang ditetapkan pada 2,8 dan dengan capaian sasaran akhir sebesar 93,57%, realisasi saat ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target jangka panjang. Capaian ini menandakan efektivitas kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM serta fasilitas riset, sekaligus menjadi dasar perbaikan dan percepatan implementasi inovasi untuk memenuhi target Renstra pada periode berikutnya. Penilaian kapabilitas inovasi oleh BRIN merupakan salah satu pilar dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menilai kemampuan daerah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi secara nyata. Penilaian fokus pada kualitas, dampak, dan keberlanjutan inovasi, meliputi indikator seperti SDM, klaster inovasi, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, belanja riset, dan penerapan hasil inovasi. Skor setiap indikator distandarisasi dan diakumulasi, kemudian digabung dengan pilar lain dalam IDSD, sehingga mencerminkan posisi daya saing daerah secara keseluruhan. Intinya, BRIN menekankan ekosistem inovasi yang efektif dan berdampak, bukan sekadar jumlah inovasi. Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- a. Faktor Keberhasilan : Adanya peningkatan capaian yang cukup signifikan pada dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi
- b. Faktor Kegagalan :
 - Kontribusi capaian dimensi riset yang relatif kecil belum dapat mendorong peningkatan nilai kapabilitas secara signifikan
 - Informasi data indeks dan nilai menunggu publikasi dari BRIN (N+1)
 - Data bersifat 'given/pemberian' dari BRIN
- c. Alternatif Solusi : Meningkatkan capaian indikator pada dimensi riset melalui intervensi fasilitasi KI dan peningkatan publikasi ilmiah

7. Nilai IKM Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Pada tahun berjalan, realisasi IKM pada Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tercatat sebesar 85,76, sedangkan target yang telah ditetapkan adalah sebesar 88,26. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target indikator tersebut adalah sebesar 97,17%, atau masih terdapat selisih sebesar 2,50 poin dari target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 88,24, realisasi IKM pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 2,48 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapperida Kabupaten Temanggung mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya. Penurunan angka ini disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya kecepatan layanan, serta keterlambatan administrasi seperti penerbitan sertifikat magang. Selain itu, penambahan jenis layanan baru seperti KKN, magang, PKL menambah beban kerja tanpa diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya dan fasilitas pendukung

Nilai IKM Bapperida Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar 85,76 juga masih berada di bawah rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mencapai 87,66, dengan selisih sebesar 1,90 poin. Selain itu, apabila dibandingkan dengan rata-rata IKM tingkat Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 88,00, capaian IKM Bapperida Kabupaten Temanggung masih lebih rendah sebesar 2,24 poin.

Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bapperida Kabupaten Temanggung telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mampu menyamai atau melampaui capaian rata-rata baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat di masa mendatang.

- a. Faktor Keberhasilan : Nilai IKM Bapperida Kabupaten Temanggung didorong oleh komitmen pimpinan dan pelaksana layanan dalam menjaga kualitas pelayanan, penerapan sistem digital, serta perilaku dan kompetensi petugas yang baik. Pelayanan yang transparan dan bebas biaya juga memperkuat kepuasan pengguna layanan
- b. Faktor Kegagalan : Kendala utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya kecepatan layanan, serta keterlambatan administrasi seperti penerbitan sertifikat magang. Selain itu, penambahan jenis layanan baru seperti KKN, magang, PKL menambah beban kerja tanpa diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya dan fasilitas pendukung
- c. Rekomendasi tindaklanjut : Bapperida berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan memperbaiki sistem administrasi, menyediakan ruang konsultasi yang representatif, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi dan evaluasi berkelanjutan agar kepuasan masyarakat kembali meningkat di tahun berikutnya

8. Nilai AKIP Perangkat Daerah

- a. Faktor Keberhasilan : Nilai 83,65 (Predikat A) yang diraih Bapperida didorong oleh komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan SAKIP secara konsisten. Ketersediaan dokumen perencanaan yang lengkap, peningkatan kualitas pelaporan, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya menjadi faktor utama. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan penerapan prinsip transparansi memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
- b. Faktor Kegagalan : Kendala yang masih dihadapi antara lain indikator kinerja yang belum sepenuhnya SMART, ketidakkonsistenan antar dokumen, serta penyelarasan (cascading) kinerja yang belum optimal. Beberapa target masih kurang menantang, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan berikutnya belum maksimal, sehingga peningkatan menuju predikat AA masih perlu diperkuat
- c. Rekomendasi tindaklanjut: Penyempurnaan dokumen perencanaan yang lebih SMART, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan tindak lanjut rekomendasi terus diperkuat agar kinerja semakin efektif dan akuntabel menuju predikat AA (sangat memuaskan).

B. INDIKATOR PROGRAM

1. Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD terhadap total program yang tercantum dalam RPJMD, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin tinggi nilai persentase yang diperoleh, menunjukkan semakin selaras arah

kebijakan, strategi, dan program pembangunan antar dokumen perencanaan tersebut. Keselarasan ini penting agar tujuan pembangunan jangka panjang dapat diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan dan program jangka menengah maupun tahunan.

2. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko

Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko digunakan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah telah mengintegrasikan prinsip manajemen risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, maupun RKPD. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan potensi hambatan, ketidakpastian, serta peluang yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan yang telah menerapkan analisis risiko terhadap total seluruh dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh perangkat daerah, kemudian dikalikan 100 persen.

Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong : Adanya kewajiban Perangkat daerah untuk menyusun dokumen Risiko pada proses perencanaan
- b. Faktor Penghambat : Adanya pergantian personil yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang tidak diiringi dengan transfer knowledge untuk personil baru
- c. Rekomendasi : Pendampingan kepada Perangkat daerah pada penyusunan Dokumen Risiko

3. Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah

Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kinerja perangkat daerah yang mencapai target dengan total keseluruhan kinerja yang diukur, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin

tinggi persentase ketercapaian kinerja menunjukkan semakin efektif perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai sasaran pembangunan daerah. Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong : Kesadaran Perangkat daerah dalam memperhatikan capaian kinerjanya
 - b. Faktor Penghambat : Adanya pergantian personil yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang tidak diiringi dengan transfer knowledge untuk personal
 - c. Rekomendasi : Penerbitan surat penagihan dokumen perencanaan
4. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur sejauh mana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah (Renja PD) telah selaras dengan arah kebijakan, prioritas, serta program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan ini penting karena menunjukkan keterpaduan antara perencanaan makro daerah dengan rencana operasional perangkat daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung secara langsung pencapaian sasaran pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah program atau kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD terhadap total program atau kegiatan dalam Renja PD, kemudian dikalikan 100 persen. Faktor pendorong untuk mencapai kinerja tersebut yaitu telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, faktor penghambat yaitu perangkat daerah tidak mendasar pada renstra dan RKPD pada saat menyusun renja perangkat daerah, sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya adalah melakukan verifikasi pada setiap tahapan penyusunan renja.

5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Ekonomi dan SDA

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) dengan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah (Renja PD). Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah program dan kegiatan dalam Renja PD yang selaras dengan RKPD terhadap total program dan kegiatan dalam Renja PD, kemudian dikalikan 100 persen. Tingkat keselarasan yang tinggi menunjukkan bahwa perangkat daerah telah menyusun rencana kerja berdasarkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD. Faktor pendorong untuk mencapai kinerja tersebut yaitu telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang ekonomi dan SDA, faktor penghambat yaitu perangkat daerah tidak mendasar pada renstra dan RKPD pada saat menyusun renja perangkat daerah, sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya adalah melakukan verifikasi pada setiap tahapan penyusunan renja.

6. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Infrastruktur

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan digunakan untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah telah selaras dengan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program atau kegiatan Renja yang selaras dengan RKPD terhadap total program atau kegiatan yang terdapat dalam Renja masing-masing perangkat daerah, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin tinggi nilai keselarasan yang diperoleh, menunjukkan semakin kuat keterkaitan antara dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Faktor pendorong untuk mencapai

kinerja tersebut yaitu telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang Infrastruktur, faktor penghambat yaitu perangkat daerah tidak mendasar pada renstra dan RKPD pada saat menyusun renja perangkat daerah, sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya adalah melakukan verifikasi pada setiap tahapan penyusunan renja.

7. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dituangkan dalam Dokumen Perencanaan

Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dituangkan dalam Dokumen Perencanaan digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil kajian, analisis, dan masukan strategis yang dihasilkan oleh Bapperida Temanggung telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Rekomendasi kebijakan tersebut dapat berasal dari hasil riset, forum konsultasi publik, analisis data sektoral, atau evaluasi program sebelumnya yang relevan dengan arah pembangunan daerah. Semakin tinggi persentase rekomendasi yang dituangkan, semakin kuat pula keterkaitan antara proses analisis kebijakan dan implementasi perencanaan pembangunan. Capaian indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas fungsi Bapperida sebagai lembaga perencana dan pengendali kebijakan pembangunan. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan telah memiliki dampak nyata terhadap penyusunan dokumen seperti RPJMD, RKPD, maupun Renstra perangkat daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi, advokasi, serta penguatan mekanisme integrasi hasil kajian dalam proses perencanaan agar kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis bukti dan berorientasi hasil. Faktor -faktor yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- a. Faktor pendorong : Adanya data dan hasil kajian yang relevan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Faktor Penghambat : Rekomendasi kebijakan dihasilkan setelah dokumen perencanaan ditetapkan/disahkan sehingga

kebijakan dapat diakomodir pada dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

- c. Rekomendasi : Mempercepat perumusan rekomendasi kebijakan untuk dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

8. Persentase Riset yang Sesuai dengan Isu Strategis

Persentase Riset yang Sesuai dengan Isu Strategis menggambarkan tingkat keselarasan riset yang dilaksanakan oleh Bapperida Temanggung maupun perangkat daerah dengan isu-isu strategis yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Isu strategis tersebut meliputi permasalahan prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan data dan analisis berbasis riset. Dengan demikian, indikator ini menjadi cerminan sejauh mana riset daerah diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang paling mendesak dan relevan.

Peningkatan nilai indikator ini menunjukkan efektivitas perencanaan berbasis riset (*evidence-based planning*), di mana hasil penelitian tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dalam penyusunan kebijakan publik. Riset yang relevan dengan isu strategis akan membantu Bapperida dan perangkat daerah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inovatif, dan berkelanjutan. Selain itu, keselarasan riset dengan isu strategis juga memperkuat peran Bapperida sebagai pusat data dan analisis pembangunan daerah. Faktor -faktor yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- a. Faktor Pendorong : Adanya kerja sama dan sinergi dengan BRIN dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan riset, Adanya road map dan agenda riset yang sejalan dengan prioritas dan isu strategis daerah
- b. Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran riset menyebabkan Bapperida mengandalkan penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk pelaksanaan riset
- c. Rekomendasi : Memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan riset di Temanggung

9. Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan

Persentase Inovasi yang Dimanfaatkan menilai seberapa besar inovasi yang dihasilkan oleh Bapperida Temanggung maupun perangkat daerah telah digunakan secara nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inovasi yang dimaksud dapat berupa sistem, metode, aplikasi, atau pendekatan baru yang dilaporkan melalui sistem pelaporan inovasi daerah BSKDN Kemendagri. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkan bukan hanya berhenti pada tahap ide atau prototipe, tetapi telah memberi manfaat praktis bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Peningkatan pemanfaatan inovasi mencerminkan keberhasilan Bapperida dalam menumbuhkan ekosistem inovatif di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mengintegrasikan hasil inovasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi juga menilai kualitas implementasi dan keberlanjutan inovasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

- a. Faktor Pendorong : Adanya peningkatan partisipasi dalam KRENOVA dari unsur masyarakat dan pelajar/mahasiswa, Adanya penghargaan/apresiasi terhadap prestasi inovasi
- b. Faktor Penghambat : Diperlukan komitmen Kepala Daerah maupun Kepala Perangkat dalam kebijakan yang dapat mendorong budaya inovasi, Terdapat kecenderungan jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam KRENOVA maupun melaporkan inovasi mengalami penurunan
- c. Rekomendasi : Mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi KRENOVA melalui berbagai media

C. INDIKATOR SPM

Bapperida tidak mendampingi indikator SPM secara teknis karena bukan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan SPM. Pendampingan indikator SPM merupakan tugas perangkat daerah pengampu urusan pelayanan dasar sesuai kewenangannya, sedangkan Bapperida berperan dalam koordinasi,

sinkronisasi, dan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Bapperida tidak terdapat Indikator Kunci.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BAPPERIDA dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja BAPPERIDA dari 17 terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

a. Manajemen Risiko Indeks

Hal ini disebabkan karena Belum adanya indikator MRI yang ditetapkan secara resmi di setiap Perangkat Daerah, mengakibatkan keterbatasan dalam pengukuran kinerja manajemen risiko; Kurangnya pegawai yang bersertifikasi MR dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko menjadi kendala dalam penguatan kapasitas dan implementasi yang efektif ; Kualitas identifikasi dan analisis risiko belum mencapai level yang memadai, terutama pada risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud) ; Cakupan monitoring dan evaluasi risiko masih terbatas, sehingga efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dalam mengurangi dampak risiko belum teruji sepenuhnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan struktural, peningkatan kapasitas sumber daya

b. Nilai IKM Perangkat Daerah

Hal ini disebabkan karena Kendala utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya kecepatan layanan, serta keterlambatan administrasi seperti penerbitan sertifikat magang. Selain itu, penambahan jenis layanan baru seperti KKN, magang,

PKL menambah beban kerja tanpa diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya dan fasilitas pendukung.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA, antara lain :
 - Belum optimalnya penerapan manajemen risiko, yang ditandai dengan belum ditetapkan indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) pada seluruh Perangkat Daerah, serta masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko
 - Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi, monitoring, dan evaluasi risiko sehingga efektivitas pengendalian risiko masih perlu ditingkatkan
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan
 - Belum optimalnya kualitas dan kecepatan pelayanan, termasuk dalam penyelesaian administrasi layanan
 - Meningkatnya beban kerja akibat penambahan jenis layanan yang belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung
 - Perlunya penguatan tata kelola organisasi, koordinasi, serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
 - Belum optimalnya penerapan manajemen risiko berpotensi mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan, sehingga pencapaian sasaran pembangunan daerah menjadi kurang optimal
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan layanan
 - Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung pencapaian program nasional di bidang reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPERIDA, yaitu Tantangan yang dihadapi meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana prasarana dan

teknologi informasi. Sementara itu, peluang yang tersedia berupa dukungan kebijakan pemerintah, perkembangan digitalisasi, dan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.

5. Formulasi isu-isu penting
- Riset Pembangunan Daerah
 - Inovasi Daerah
 - Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kualitas layanan Bapperida
 - Akuntabilitas Kinerja Bapperida

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
NIHIL			

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7.
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2	%	5.869.134.842	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2	%	5.869.134.842	
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%		
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%		
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	1.500.000	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	1.500.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu			4.774.178.492	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu			4.774.178.492	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tem anggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang/bul an	4.774.178.492	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Te mangg ung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang/bul an	4.774.178.492	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.902.500	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.902.500	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tem anggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.365.000	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.365.000	
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tem anggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	15.610.000	2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	15.610.000	
3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	laporan	19.155.000	3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	laporan	19.155.000	
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	laporan	67.772.500	4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	laporan	67.772.500	
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun			642.801.500	d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun			642.801.500	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	580.000	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	580.000	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	109.100.000	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	109.100.000	
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	laporan	533.121.500	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	laporan	533.121.500	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					341.752.350,	e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					341.752.350,	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	161.164.500	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Te mang gung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	161.164.500	
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	unit	38.843.850	2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Te mang gung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	unit	38.843.850	
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	141.744.000	3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Te mang gung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	141.744.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah	92	%	250.000.000	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah	92	%	250.000.000	
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	60	%					Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	60	%		

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
			Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	80	%					Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	80	%		
a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah laporan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah			152.500.000	a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah laporan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah			152.500.000	
1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Kebijakan Lainnya	Kab.Temanggung	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	dokumen	20.000.000	1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Kebijakan Lainnya	Kab.Te mang gung	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	dokumen	20.000.000	
2)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3	Berita Acara	39.000.000	2)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab.Te mang gung	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3	Berita Acara	39.000.000	
3)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	dokumen	93.500.000	3)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Te mang gung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	dokumen	93.500.000	
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan		Jumlah dokumen informasi pembangunan daerah yang disusun			17.500.000	b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan		Jumlah dokumen informasi pembangunan daerah yang disusun			17.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPd							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
	Pembangunan Daerah							Pembangunan Daerah						
1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	buku	17.500.000	1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Te mang gung	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	buku	17.500.000	
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			10.000.000	c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			10.000.000	
1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab.Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	laporan	80.000.000	1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab.Te mang gung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	laporan	80.000.000	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia	91	%	275.302.000	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia	91	%	275.302.000	
			Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang ekonomi dan SDA	91	%					Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang ekonomi dan SDA	91	%		
			Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang infrastruktur	91	%					Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang infrastruktur	91	%		
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan		Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan			82.500.000	a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan		Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan			82.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
	Pembangunan Manusia		dan pembangunan manusia					Pembangunan Manusia		dan pembangunan manusia				
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	66	dokumen	35.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te mangg ung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	66	dokumen	35.000.000	
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	laporan	5.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	laporan	5.000.000	
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11	dokumen	37.500.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11	dokumen	37.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	laporan	5.000.000	4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	laporan	5.000.000	
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA			137.802.000	b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA			137.802.000	
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	dokumen	117.802.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	dokumen	117.802.000	
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	laporan	5.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	laporan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	dokumen	15.000.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	dokumen	15.000.000	
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur			55.000.000	c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur			55.000.000	
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Tem anggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7	dokumen	50.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab.Te mangg ung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7	dokumen	50.000.000	
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab.Tem anggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	laporan	5.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	laporan	5.000.000	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan	70	%	27.000.000	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan	70	%	27.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
			dalam dokumen perencanaan							dalam dokumen perencanaan				
a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun			25.000.000	a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun			25.000.000	
1)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab.Temanggung	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3	laporan	25.000.000	1)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab.Te manggung	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3	laporan	25.000.000	
b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dilakukan			2.000.000	b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dilakukan			2.000.000	
1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	dokumen	2.000.000	1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab.Te manggung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	dokumen	2.000.000	
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	50	%	158.000.000	5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	50	%	158.000.000	
			Persentase inovasi yang dimanfaatkan	70	%					Persentase inovasi yang dimanfaatkan	70	%		
a	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan		Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dilakukan			40.000.000	a	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan		Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dilakukan			40.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
1)	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kab.Temanggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	2	laporan	40.000.000	1)	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kab.Te manggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	2	laporan	40.000.000	
b	Invensi dan Inovasi		Jumlah invensi dan inovasi yang difasilitasi			118.000.000	b	Invensi dan Inovasi		Jumlah invensi dan inovasi yang difasilitasi			118.000.000	
1)	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Kab.Temanggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1	Laporan	3.945.500	1)	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Kab.Te manggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1	Laporan	3.945.500	
2)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kab.Temanggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1	Laporan	17.000.000	2)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kab.Te manggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1	Laporan	17.000.000	
3)	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan	Kab.Temanggung	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan	2	kegiatan	12.713.500	3)	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan	Kab.Te manggung	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan	2	kegiatan	12.713.500	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	K et
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4			5	
	teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/orga nisasi penelitian lainnya di daerah		teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organis asi penelitian lainnya di daerah					teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah		teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organis asi penelitian lainnya di daerah				
4)	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kab.Tem anggung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2	laporan	84.341.000	4)	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kab.Te mangg ung	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2	laporan	84.341.000	
	TOTAL					6.579.436.842		TOTAL				TOTAL	6.579.436.842	

Sumber : SIPD BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2027

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.8.
Usulan program dan kegiatan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Jembatan Nglarangan Jalan Kabupaten Pare - Nguwet	Jembatan Kali Nglarangan, Ruas Jalan Pare - Nguwet - Desa Nguwet	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	15 m x 4,5 m x 6 m	
2	Penyediaan Sanitasi Air Minum	Desa Nampirejo	Tersedianya air bersih	700 rumah	
3	Pemeliharaan Jembatan Pengilon - Wonosari	Jembatan Kalisemen, Ruas Jalan Pengilon - Wonosari (Desa Pakurejo	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	1 paket	
4	Pembangunan aspal jalan Candirotto - Bandarejo (Jalan antar kecamatan candirotto - gemawang)	Ruas Jalan Candirotto - Bandarharjo	Panjang jalan yang direhabilitasi	'± 400 m (sesuai RAB)	
5	pembangunan Pelebaran jalan raya kaloran - kranggan	Ruas jalan kranggan - kaloran	panjang jalan yeng dilebarkan menuju standar	'± 1.000 meter	
6	Pelebaran dan Peningkatan jalan Lempuyangan - Tretep	ruas jalan Lempuyangan - Tretep	panjang jalan yeng dilebarkan menuju standar		
7	peningkatan kapasitas ruas jalan wonoboyo - campurejo	ruas jalan wonoboyo-campurejo	terpeliharanya jalan secara berkala	1 paket (RAB terlampir)	
8	pembangunan jalan kabupaten (tleter-wonokerso) no 33-23-186	ruas jalan tleter - wonokerso	panjang jalan yang direkonstruksi	'± 450 m	
9	pelebaran jalan	ruas jalan caturanom - glapansari	Panjang jalan yang di pelihara secara berkala	'± 825 m	
10	peningkatan ruas jalan banjarsari - kataan	ruas Jalan Banjarsari - Kataan	panjang jalan yang di rehabilitasi	'± 1,1 km	
11	peningkatan ruas jalan Kabupaten (Lanjutan Braman - Gemawang)	Ruas Jalan Kebraman - Gemawang	panjang jalan yang dipelihara secara berkala	'1 paket	
12	Pembangunan dan Pelebaran Jalan Setretes Desa Campuranom	Ruas Jalan Caturanom - Campuranom	panjang jalan yang dipelihara secara berkala	'300 m	
13	Peningkatan Jalan Kabupaen ruas Jalan Tlogomulyo - Delok	Ruas Jalan Tlogomulyo - Delok	panjang jalan yang dipelihara secara berkala	'305,29 m	
14	Pembangunan Ruas Jalan Aspal Bejen - Ngaliyan	Ruas Jalan Bejen - Ngaliyan	panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	'±700 m	
15	Pelebaran jalan dan Jembatan	Ruas Jalan Parakan Wonosroyo (jembatan kali Ngerancang)	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	'1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
16	pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan umum Botoputih Gandu banaran	Ruas jalan Greges - banaran	jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota yang terbangun		
17	penerangan jalan umum jalan muntung - jumo	ruas jalan muntung - jumo ruas jalan jumo - ketitang ruas jalan ngadirejo - tegong	jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota yang terbangun	25 unit	
18	Pembangunan/pengadaan lampu penerangan jalan umum, jalan nasional ruas jalan paponan - kledung	batas kabupaten wonosobo / Temanggung-parakan	jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota yang terbangun	24 unit @19 Juta (spesifikasi berbeda dengan ruas jalan kewenangank abupaten)	
19	pengadaan lampu penerangan jalan kabupaten ruas jalan tembarak gambasan (dusun koripan desa kacepit), Ruas jalan bengkal - Gambasan (tanjakan suruh desa plumbon) ruas jalan dalangan bagusan (jembatan pertigaan plumbon - bumiayu - bagusan), ruas jalan setugu - ngaditirto (komplek gedung KDKMP jambanan desa ngaditirto), ruas jalan gatak - ngaditirto (tanjakan tompak desa jetis)	Ruas Jalan Tembarak - Gambasan Ruas Jalan Bengkal - Gambasan Ruas Jalan Dalangan - Bagus Ruas Jalan Setugu - Ngaditirto Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto	jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota yang terbangun	20 unit	
20	pengadaan lampu jalan umum	ruas jalan kandang - rowoseneng	jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota yang terbangun	46 unit @18 juta untuk jalan raya kandang - rowoseneng	

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BAPPERIDA ada 8 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan	DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi,	APBD dan Non APBD	Konsep tematik-holistik karena fokus pada tantangan yang dihadapi dan dilakukan secara menyeluruh. Konsep integratif karena dilaksanakan oleh semua	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Terbukanya lapangan kerja baru Tertanganinya Lahan Kritis	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pelestarian lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat	Bapperida 2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
	Ekonomi Masyarakat) RKPD Tahun 2023	Media Sosial, TJSLP/CSR		stakeholder secara terpadu dalam bentuk kolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing dan integrasi pendanaan. Konsep spasial karena pemetaan lokasi yang jelas serta perencanaannya berbasis data dan informasi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
2	Sumbing Sindoro Innovative (Susi) Award Kabupaten Temanggung	DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR	APBD dan Non APBD	inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	• Upaya meningkatkan Inovasi Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung • Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan Masyarakat - Mendorong masyarakat untuk selalu berinovasi dalam usaha dan produksi dalam meningkatkan perekonomiannya	• Meningkatkan jumlah invasi di Kabupaten Temanggung • Terjadinya peningkatan ekonomi Masyarakat - Meningkatkan SDM Masyarakat	Bapperid a Tahun 2023
3	Pena Kita (Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pelaporan Pembangunan Daerah Di Bapperida Kabupaten Temanggung	Perangkat Daerah	APBD	• Pembentukan Tim Efektif • Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder • Penyusunan Analisis Desain Sistem Aplikasi PENA KITA • Pembuatan Aplikasi PENA KITA • Penambahan Menu Data Pokok Pembangunan • Sosialisasi PENA KITA • Bimbingan Teknis Tahap I Implementasi	• Pena Kita (Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja) sebagai pelaporan pembangunan	• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses penyusunan laporan pembangunan daerah yang akuntabel • Memudahkan stakeholder dan masyarakat dalam mengakses data dan informasi pembangunan	Bapperid a Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				Aplikasi PENA KITA Launcing PENA KITA			
4	Sinergitas Multi Helix dan Rakai Pikatan Untuk Penganggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Media/Pers, Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Aliansi	APBN, APBD, TJSPL, Sumber lainnya	- Pembentukan Tim Efektif - Rapat Koordinasi dan Rakor Stakeholder Internal dan Eksternal - Pembuatan Surat Keputusan Tim Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi - Terjalannya Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah Percepatan Penghapusan Kemiskinan - Pembuatan SOP Percepatan Penghapusan Kemiskinan - Sosialisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan - Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Kemiskinan - Pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan melalui fasilitasi dan Promosi untuk peningkatan UMKM dan pariwisata minimal satu bulan sekali di 4 kegiatan yang melibatkan 3 (tiga) kecamatan yaitu (Pringsurat, Kaloran, dan Kandangan) berdasarkan kearifan lokal masing-masing serta	mensinergikan program dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan ruang bagi pihak lembaga non pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan	tercapainya target percepatan penghapusan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan peran serta lembaga non pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi	Bapperida Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				melakukan monitoring dan evaluasi Penyusunan Draft Rancangan Perbup Percepatan Kemiskinan			
5	Peka Pangan (Pemuda Berkarya untuk Pertanian Berkelanjutan)	Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Akademi, Masyarakat Lokal, Media, Masyarakat Daerah Lain	APBD, APBD Provinsi, Dana Desa, BRI	INISIASI 52 PEMUDA dari 6 Desa bangkit dan berkomitmen kuat mengelola usaha penggemukan domba (terpadu, modern, kolaborasi) untuk pertanian yang berkelanjutan (aspek sosial, ekonomi dan lingkungan)	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Menciptakan Lapangan Pekerjaan Mewujudkan pertanian yang berkelanjutan Mewujudkan Kawasan pertanian terintegrasi Mewujudkan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Pendapatan dan Perekonomian Keluarga, Perubahan Pola Pikir dan Peremberdayaan Masyarakat, Pertanian Tertat dengan Keseimbangan Alam	Bapperid a Tahun 2023
6	BUMI MUTIARA RKPD Tahun 2024	Pemerintah Daerah, DKPPP,FTJLS, Mitra Usaha	APBD	menggerakkan pengembangan sektor Pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dengan menciptakan akses serta kesempatan luas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Meningkatan produksi pertanian komoditas kopi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatan produksi pertanian komoditas kopi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2024
7	Ngobrol Sore (Sobat Perencana)	Multihelix, Perangkat Daerah, Mitra Usaha, Masyarakat	APBD	Meningkatkan Publikasi Program-program BAPPERIDA, Meningkatkan Sering kegiatan Kolaborasi, Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap program dan kegiatan BAPPERIDA	Mengetahui pengetahuan Masyarakat terhadap program dan kegiatan BAPPERIDA	2024
8	Sistem Informasi Dan Database Inovasi Daerah (SIDA KITA)	Perangkat Daerah	APBD	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, Bapperida Kabupaten Temanggung menginisiasi inovasi Sistem	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan regulasi inovasi, sosialisasi inovasi, pengembangan inovasi, monitoring dan evaluasi inovasi serta	2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				Informasi dan Database Inovasi Kabupaten Temanggung (SIDA KITA) untuk pengelolaan data dan informasi inovasi daerah secara terpadu dan terintegrasi		melaporkan hasil inovasi yang dilaksanakan oleh Bapperida	

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BAPPERIDA ada 6 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan Kabupaten Temanggung sebagai Penerima Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dengan Predikat Kabupaten Terbaik I	Gubenur Jawa Tengah	Provinsi	BAPPERIDA
2	Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 Diberikan kepada Kabupaten Temanggung Atas Prestasi Terbaik I Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten	Bappenas	Nasional	BAPPERIDA
3	Piagam Penghargaan di berikan kepada Bapperida sebagai Perangkat Daerah Terbaik I Pengelolaan Risiko Tahun Anggaran 2024	Bupati Temanggung	Kabupaten	BAPPERIDA
4	Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Terinovatif	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	BAPPERIDA
5	Piagam Penghargaan Kabupaten Temanggung Terbaik 1 Tingkat Nasional Penghargaan Perencanaan Daerah (PPD) Tahun 2025	Kementrian PPN/Bappenas RI	Nasional	BAPPERIDA
6	Piagam Penghargaan Bapperida Kabupaten Temanggung sebagai Juara 3 Kategori Media Sosial Perangkat Daerah	Bupati Temanggung	Kabupaten	BAPPERIDA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BAPPERIDA Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh BAPPERIDA lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BAPPERIDA Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPERIDA

Tujuan BAPPERIDA yang dirumuskan dalam Renstra BAPPERIDA 2025-2029 adalah “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ” dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja BAPPERIDA .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BAPPERIDA Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BAPPERIDA Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah			Indeks perencanaan pembangunan daerah	Angka	83.4	85.8
			Indeks inovasi daerah	Nilai	74	75
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah		Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Nilai	21.40	21.60
			Nilai capaian kinerja Pembangunan daerah	Nilai	89	93
			Manajemen risiko indeks (MRI)	Indeks	3.015	3.025
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah		Kapabilitas Inovasi	Angka	2.7	75
	Meningkatnya kualitas tatakelola perangkat daerah dalam pelayanan publik		Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	88.3	88.34
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	83.85	84.05
	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	92	96
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	60	70
			Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80	90
	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	91	95
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	91	95
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	91	95

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	70	90
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50	50
			Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	70	90

Sumber : Renstra BAPPERIDA Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran BAPPERIDA Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan BAPPERIDA

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan BAPPERIDA Kab. Temanggung Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						6.579.436.842,00							7.190.099.943,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.579.436.842,00							7.190.099.943,00	
	5.01	PERENCANAAN						6.394.436.842,00							6.933.917.943,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.869.134.842,00							6.192.788.520,00	
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-		-	2 %	108.902.500,00						-	69.500.000,00	
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-		-	100 %	984.553.850,00						-	751.900.000,00	
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-		-	100 %	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			-	-		-	-	4.774.178.492,00						-	5.369.888.520,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					Kabupaten Temanggung		1.500.000,00	
		-						1.500.000,00					Kabupaten Temanggung		1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	1.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.774.178.492,00					Kabupaten Temanggung		5.369.888.520,00	
		-						4.774.178.492,00					Kabupaten Temanggung		5.369.888.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.774.178.492,00						-	5.369.888.520,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.774.178.492,00							5.369.888.520,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	42 Orang/bulan	4.774.178.492,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanifilm industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	5.369.888.520,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						108.902.500,00					Kabupaten Temanggung		69.500.000,00	
		-						108.902.500,00					Kabupaten Temanggung		69.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	19.155.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	67.772.500,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.610.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.365.000,00						-	4.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.365.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	6.365.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	4.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.610.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	15.610.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	12.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.155.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	2 Laporan	19.155.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.772.500,00							48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	15 Laporan	67.772.500,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	48.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						642.801.500,00					Kabupaten Temanggung		556.400.000,00	
		-						642.801.500,00					Kabupaten Temanggung		556.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	109.100.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	533.121.500,00						-	435.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	580.000,00						-	500.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						580.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	580.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						109.100.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	109.100.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						533.121.500,00							435.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	533.121.500,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	435.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						341.752.350,00					Kabupaten Temanggung		195.500.000,00	
		-						341.752.350,00					Kabupaten Temanggung		195.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	141.744.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	161.164.500,00						-	125.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	38.843.850,00						-	30.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						161.164.500,00							125.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	27 Unit	161.164.500,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	125.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						38.843.850,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	38.843.850,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						141.744.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	141.744.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						250.000.000,00							340.245.000,00	
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	-		-	60 %	250.000.000,00						-	340.245.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	92 %	80.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	92 %	170.000.000,00						-	340.245.000,00	
			Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	-		-	80 %	250.000.000,00						-	340.245.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						152.500.000,00					Kabupaten Temanggung		305.245.000,00	
		-						152.500.000,00					Kabupaten Temanggung		305.245.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	39.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	-		-	-	93.500.000,00						-	265.245.000,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						39.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	3 Berita Acara	39.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						93.500.000,00							265.245.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	4 Dokumen	93.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	265.245.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						17.500.000,00					Kabupaten Temanggung		35.000.000,00	
		-						17.500.000,00					Kabupaten Temanggung		35.000.000,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-		-	-	17.500.000,00						-	35.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						17.500.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-		-	3 Buku	17.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00					Kabupaten Temanggung		0,00	
		-						80.000.000,00					Kabupaten Temanggung		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	3 Laporan	80.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						275.302.000,00							400.884.423,00	
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	-		-	91 %	137.802.000,00						-	133.628.140,00	
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	-		-	91 %	55.000.000,00						-	133.628.140,00	
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-		-	91 %	77.500.000,00						-	125.628.143,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						82.500.000,00					Kabupaten Temanggung		133.628.143,00	
		-						82.500.000,00					Kabupaten Temanggung		133.628.143,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	37.500.000,00						-	60.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	35.000.000,00						-	57.028.143,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	5.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	-	5.000.000,00						-	8.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						35.000.000,00							57.028.143,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	66 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	57.028.143,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						5.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	8.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						37.500.000,00							60.600.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	11 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	60.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	8.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						137.802.000,00					Kabupaten Temanggung		133.628.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						137.802.000,00					Kabupaten Temanggung		133.628.140,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	117.802.000,00						-	91.128.140,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	15.000.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	-	5.000.000,00						-	10.500.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						117.802.000,00							91.128.140,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	2 Dokumen	117.802.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	91.128.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						5.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	10.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						15.000.000,00							32.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	32.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						55.000.000,00					Kabupaten Temanggung		133.628.140,00	
		-						55.000.000,00					Kabupaten Temanggung		133.628.140,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	50.000.000,00						-	121.628.140,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	-	5.000.000,00						-	12.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							121.628.140,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	7 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	121.628.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						5.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	12.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						185.000.000,00							256.182.000,00	
4.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						27.000.000,00							53.037.100,00	
			Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	-		-	70 %	27.000.000,00						-	53.037.100,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						25.000.000,00					Kabupaten Temanggung		49.237.100,00	
		-						25.000.000,00					Kabupaten Temanggung		49.237.100,00	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-		-	-	25.000.000,00						-	49.237.100,00	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						25.000.000,00							49.237.100,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-		-	3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	49.237.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						2.000.000,00					Kabupaten Temanggung		3.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.000.000,00					Kabupaten Temanggung		3.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-		-	-	2.000.000,00						-	3.800.000,00	
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						2.000.000,00							3.800.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	3.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						158.000.000,00							203.144.900,00	
			Persentase inovasi yang dimanfaatkan	-		-	70 %	158.000.000,00						-	203.144.900,00	
			Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	-		-	50 %	158.000.000,00						-	203.144.900,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						40.000.000,00					Kabupaten Temanggung		113.144.900,00	
		-						40.000.000,00					Kabupaten Temanggung		113.144.900,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	40.000.000,00						-	113.144.900,00	
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						40.000.000,00							113.144.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	113.144.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						118.000.000,00					Kabupaten Temanggung		90.000.000,00	
		-						118.000.000,00					Kabupaten Temanggung		90.000.000,00	
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	-		-	-	12.713.500,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-		-	-	84.341.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	-	17.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	-	3.945.500,00						-	22.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						3.945.500,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-		-	2 Laporan	84.341.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	J U M L A H							6.579.436.842,00							7.190.099.943,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BAPPERIDA Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan BAPPERIDA Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2027.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BAPPERIDA Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BAPPERIDA Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KELITBANGAN)			A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KELITBANGAN)		-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	5.869.134.842		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	5.869.134.842	-
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000		a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	-
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000		1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.774.178.492		a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.774.178.492	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.774.178.492		1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.774.178.492	-
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.902.500		b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.902.500	-
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.000		1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.000	-
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.610.000		2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.610.000	-
3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.155.000		3)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.155.000	-
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.772.500		4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.772.500	-
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.801.500		c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.801.500	-
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.000		1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.000	-

RANCANGAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.100.000		2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.100.000	-
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.121.500		4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.121.500	-
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.752.350,		g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.752.350,	-
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.164.500		1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.164.500	-
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.843.850		2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.843.850	
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.744.000		3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.744.000	-
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000		2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000	-
a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	152.500.000		a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	152.500.000	-
1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000		1)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000	-
2)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	39.000.000		2)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	39.000.000	
3)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000		3)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000	-
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17.500.000		b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17.500.000	-
1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000		1)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000	-
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000		c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	-

RANCANGAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80.000.000	1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80.000.000	-
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	275.302.000	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	275.302.000	-
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	82.500.000	a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	82.500.000	-
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000	-
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	-
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.500.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.500.000	-
4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.000.000	4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.000.000	-
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137.802.000	b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137.802.000	-
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.802.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.802.000	-
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.000.000	-
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	-
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	55.000.000	c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	55.000.000	-
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	-

RANCANGAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.000.000	2)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.000.000	-
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	27.000.000	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	27.000.000	-
a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000	a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	25.000.000	-
1)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	1)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	-
b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.000.000	b	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.000.000	-
1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.000.000	1)	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.000.000	-
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI	158.000.000	5	PROGRAM RISET DAN INOVASI	158.000.000	
a	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	40.000.000	a	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	40.000.000	
1)	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	40.000.000	1)	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	40.000.000	
b	Invensi dan Inovasi	118.000.000	b	Invensi dan Inovasi	118.000.000	
1)	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	3.945.500	1)	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	3.945.500	
2)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	17.000.000	2)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	17.000.000	
3)	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	12.713.500	3)	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	12.713.500	

RANCANGAN RENJA BAPPERIDA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
4)	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	84.341.000	4)	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	84.341.000	
	TOTAL	6.579.436.842		TOTAL	6.579.436.842	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif BAPPERIDA Tahun 2026 telah sesuai antara Rancangan Renja BAPPERIDA dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
1	Perencanaan				
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	angka	94,78	83,40	
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	2,911	3,015	
3	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	98,56	89	
4	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,75	21,40	
2	Penelitian dan Pengembangan				
1	Indeks Inovasi Daerah	nilai	88,88	74	
2	Kapabilitas Inovasi	angka	2,62	2,7	

Sumber : Renstra BAPPERIDA Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Terdapat 2 Indikator Kinerja Kunci BAPPERIDA yaitu :

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
1	Perencanaan	1	Persentase Kesesuaian Antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	$\frac{\text{Program atau Kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan di Realisasikan}}{\text{Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program Prioritas Presiden}} \times 100$	Persen	100	-	RKPD dan APBD
2	Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah}} \times 100$	Persen	100	-	RKPD

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (data diolah)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga indikator tersebut belum termuat dalam Renstra Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan baru terakomodir dalam Renja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BAPPERIDA untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BAPPERIDA Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BAPPERIDA itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BAPPERIDA dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BAPPERIDA Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BAPPERIDA Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

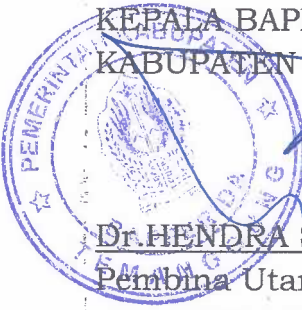
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 92,45 %, realisasi Belanja Modal sebesar 99.30 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 22,83%, realisasi Belanja Modal sebesar 0%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 BAPPERIDA mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.579.436.842,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah; Program Riset Dan Inovasi Daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BAPPERIDA Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada

saat penyusunan tujuan dan sasaran BAPPERIDA dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 20 Juli 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003